BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sumber daya alam adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh suatu daerah untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kelansungan masyarakat dan daerah. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak dan berlimpah yang apabila dikelola dengan baik dan benar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat dan daerah.

Pada Sektor petanian yang mencakup pengusahaan dan pemanfaatan sumber bahan- bahan biologis dari alam untuk dijual dan dikonsumsi. Sektor pertanian mencakup subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan hasil-hasilmya, kehutanan dan perikanan. Subsektor tanaman bahan makanan meliputi seluruh kegiatan yang dimana dapat menghasilkan bahan makanan. Pada sector tanaman perkebunan yaitu, semua kegiatan yang menghasilkan komoditas tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh rakyat maupun suatu perusahaan.(Taryoko, 2016)

Pada subsektor pertanian dan hasi-hasilnya meliputi semua kegiatan pembibitan dan budidaya segaja jenis ternak dan ungags dengan tujuan untuk pengembangbiakan , dibesarkan, serta dipotong dan kemudian diambil hasilnya yang dilakukan oleh rakyat maupun usaha peternakan. Subsektor kehutanan menccakup berbagai kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun- daunan, getah- getah dan akar akaran serta juga kegiatan perburuan. Subsektor perikanan mencakup berbagai kegiatan seperti penangkapan,

pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan atau biota ikan lainya, baik itu yang berada di air tawar maupun air asin. (Taryoko,2016)

Kota Palopo memiliki 9 kecamatan yaitu Wara Selatan, Sendana, Wara, Wara Timur, Mungkajang, Wara Utara, Bara, Telluwanua dan Wara Barat. Di kedelapan kecamatan tersebut terdapat berbagai sumber daya alam yang tersebar di berbagai kercamatan tertutama pada sektor perikanan dan pariwisatanya yang sangat banyak. Selain pariwisatanya terdapat pula sumber daya alam lain seperti, sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Tabel 1.1

Data Luas Pertanian berdasarkan Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2019.

Kecamatan	Lahan Pertanian		Lahan Non Pertanian	Jumlah
	Sawah	Bukan sawah		
Wara Selatan	136	465	465	1066
Sendana	263	2426	1020	3709
Wara	83	8	1058	1149
Wara Timur	-	199	1009	1208
Mungkajang	47	1158	4175	5380
Wara Utara	5	246	807	1058
Bara	-	1481	854	2335
Tellumanua	860	2074	500	3434
Wara Barat	180	1646	3587	5413
PALOPO	**1574**	**9703**	**13475**	**24752**

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo/ BPS Kota Palopo.

Dari Data diatas Kota Palopo memiliki luas 24.752 Ha terdiri dari lahan pertanian yang memiliki luas sebesar 11.277 Ha (46,56%) dan Lahan bukan pertanian sebesar 13.475 Ha (54,44%). Lahan pertanian di Kota Palopo Pada Tahum 2018 mencakup 1.574 Ha lahan sawah dan 9.703 Ha lahan bukan sawah. Luas panen padi pada tahun 2019 adalah 3,161,47 Ha, dengan produksi sebanyak

20.288,32 ton. Selain Padi, di Kota Palopo juga memproduksi jagung sebanyak 4.737,00 ton. (BPS Palopo,2020)

Pada tahun 2019 di Kota Palopo untuk tanaman hortikultura sayuran yang paling banyak dihasilkan adalah kangkung dimana dari luas panen 126 hektar mampu menghasilkan 960 ton. Selain kangkung, di Kota Palopo terdapat pula produksi bayam sebanyak 737,00 ton dan untuk produksi cabai sebanyak 133,20 ton. Sedangkan untuk jenis buah-buahan, yang paling banyak di hasilkan di Kota Palopo pada tahun 2019 adalah duku/langsat dan durian, dengan produksi masing-masing sebanyak 3.500,70 ton dan 2.002,70 ton. (BPS Palopo, 2020)

Produksi tanaman perkebunan didominasi oleh kakao yang hasil produksinya mencapai 1.950,22 ton pada areal dengan luas 2.640,45 hektar. Selain kakao, di Kota Palopo juga terdapat pula juga produksi tanaman kopi dan juga kelapa. Produksi tamanan kopi menghasilkan sebanyak 50,96 ton dan tanaman kelapa menghasilkan sebanyak 17,70 ton. Luas Kawasan hutan di Kota Palopo dibagi menjadi Hutan Lindung, Suaka Alam dan Pelestarian alam, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap serta Hutan Konversi. Total luas Kawasan hutan di Kota Palopo pada tahun 2019 adalah seluas 10.242,82 Ha, dengan Hutan Lindung seluas 8.666 Ha, Taman Wisata Alam seluas 968,82 Ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas 608,00 Ha. (BPS Palopo, 2020)

Ternak di Kota Palopo pada tahun 2019 didominasi oleh sapi potong yang jumlahnya mencapai 3089 ekor dimana jumlah sapi terbanyak berada di Kecamatan Sendana sebanyak 845 ekor. Sedangkan untuk unggas terbanyak adalah ayam pedaging yang berjumlah 3.029,784 ekor. Selain itu, Produksi

Perikanan terdiri dari perikanan tangkap di laut dengan jumlah produksi 18.347,10 ton dan perikanan budidaya dengan jumlah 108.715,25 ton. (BPS Palopo, 2020)

Berdasarkan informasi yang di kutip dari halaman berita Palopo fajar 2019. Tingkat dan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan sangat bervariasi besarnya, dimana sangat ditentukan oleh sumber daya yang dikelola dan hasil komoditi yang diusahakan. Perbaikan pendapatan petani nelayan Kota Palopo terus diupayakan melalui usaha perbaikan dan penyempurnaan arana/prasarana, maupun pembinaan dan penyuluhan serta menerapkan teknologi yang dianjurkan, maupun memperbaiki mata rantai pemasaran ikan melalui informasi harga pasar ikan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil yang selanjutnya disebut PWP3K, adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau – pulau kecil antar sektor, antar pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Palopo fajar, 2019).

Kelangsungan produktifitas sumber daya laut dan pesisir sangat didukung oleh kondisi ekosistem pesisir yang baik dan alami yang mempunyai peranan penting bagi kehidupan biota laut baik secara langsung maupun tidak langsung di wilayah pesisir. ”Sumber daya alam dan keanekaragaman hayati tersebut perlu dikelola secara terkoordinasi dan terpadu dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.Infrastruktur wilayah pesisir sangat penting artinya untuk dimaksimalkan dalam rangka mempermudah akses para nelayan baik dalam rangka mengoptimalkan penangkapan maupun dalam rangka

meningkatkan produksi dan pemasaran hasil perikanan," tandasnya. (Palopo fajar, 2019).

Indonesia yang merupakan negara yang mempumyai berbagai sumber-sumber untuk pendapatann. Sumber- sumber yang jika dapat dikelola dengan baik akan memberikan dapat dampak baik juga untuk negara Indonesia. Daerah-daerah juga memiliki potensi yang beragam dari setiap daerahnya. Potensi daerah itu misalnya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan daerah. jika potensi itu dikelola dan lakukan dengan baik dapat dijadikan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah serta membiayai kegiatan dalam pembangunan daerah.

Studi yang dilakukan oleh Steven dan McGowen (1983) menunjukkan bahwa jumlah pekerja mempengaruhi kemandirian finansial pemerintah daerah. Semakin banyak tenaga kerja yang dimiliki suatu daerah akan semakin mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pendapatan pemerintah daerah yang tinggi tersebut akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah.(Taryoko,2016)

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika tenaga kerja berpartisipasi dalam proses produksi, pekerja menerima pendapatan sebagai pembayaran atas pekerjaan yang mereka selesaikan, yaitu upah. Modal pembangunan yang penting selain keuangan daerah dan investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih cepat

dirasakan untuk daerah sendiri sehingga nantinya dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas di samping terpenuhinya kuantitas permintaan tenaga kerja. (Taryoko,2016).

Tabel 1.2 Data Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	4647	1314	5961
Manufaktur	10473	3255	13728
Jasa	26995	25566	52561
Jumlah	42115	30135	72250

Sumber: BPS Palopo,2020

Berdasarkan data di atas jumlah tenaga kerja di Kota Palopo Pada Tahun 2019 sebesar 72250 jiwa. Lapangan kerja utama yang jumlah tenaga kerja terbanyak berada pasa lapangan pekerjaan utama jasa dengan jumlah laki- laki sebesar 26995 dan jumlah perempuan yang bekerja pada sektor jasa adalah sebesar 25556 maka total jumlah jumlah tenaga kerja pad sektor jasa adalah 52561. Sedangkan sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja terbawah sebesar 5961 jiwa.

Indikator yang mencerminkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik adalah pemerintah daerah yang memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut juga mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah maka pemerintah daerah akan menuntut peningkatan pelayanan publik. Jumlah penduduk mempengaruhi kemandirian finansial pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula persyaratan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik. (Darmanto, 2012)

Tabel 1.3 Data Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Palopo, Tahun 2019.

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Wara Selatan	12106	2,19
Sendana	6829	2,15
Wara	39955	2,18
Wara Timur	39701	2,18
Mungkajang	8279	2,18
Wara Utara	23621	2,17
Bara	28781	2,17
Tellumanua	13911	2,18
Wara Barat	11431	2,16
PALOPO	**184614**	**2,18**

Sumber : BPS Palopo 2020

Berdasarkan gambar di atas jumlah penduduk di Kota Palopo pada tahun 2019 Sebesar 184614 jiwa mengalami sedikit kenaikan dibandingkan jumlah penduduk di Kota Palopo sebesar 180678 jiwa. Maka bertambahnya jumlah penduduk di Kota Palopo akan semakin besarnya juga tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik yang baik.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari skala PAD yang diperoleh di daerah terkait. Meski memberikan otonomi daerah yang lebih besar, PAD selalu dianggap sebagai indikator atau standar untuk mengukur ketergantungan daerah pada pusat. Pada prinsipnya, semakin besar kontribusi PAD kepada APBD, maka ketergantungan daerah terhadap penyelenggaraan otonomi pusat juga semakin besar. Yang lebih kecil, dengan cara yang benar-benar bertanggung jawab (Rinaldi, 2012).

Tabel 1.4 Data Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan di Kota Palopo, Tahun 2017-2019

Tahun	Pendapatan Asli daerah	Dana perimbangan
2017	16730713161	70707873004
2018	13928284648	74708259392
2019	16567381478	72633970174

Sumber: BPS Palopo

Berdasarkan data yang didapat dari BPS Kota Palopo bahwa pada tahun 2017 pendapatan asli daerah sebesar 167.307.131.61 dan dana perimbangan sebesar 707.078.730.04. Sedangkan pada tahun 2018 pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar 139.282.846.48 dan dana perimbangan naik sebesar 747.082.593.92. dan pada tahun 2019 pendapatan asli daerah kembali naik menjadi 165.673.814.78 tetapi dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 726.339.701.74.

Ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untukmengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom yang dimaksud adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyaibatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ronald & Sarmiyatiningsih, 2010)

Suprapto (2006) menunjukkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki Kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan Demokrasi, keadilan, keadilan dan keberlanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki setiap daerah. Pemerintah daerah dapat memenuhi kewajiban ini jika mereka dapat mengelola sumber daya keuangan potensial dengan sebaik-baiknya. (Putri, 2017)

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia masalah utama yang dihadapi daerah otonom adalah rendahnya penerimaan PAD, sementara di sisi lain potensi

sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia cukup melimpah dan potensial untuk dikembangkan begitu juga dengan Kota Palopo yang memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD (Ramadhani,2016). Hal ini yang menjadi salah satu alasan saya untuk mengambil penelitian di Kota Palopo.

Menurut Ariasih (2013), jumlah penduduk yang tinggi dan PDRB per kapita yang tinggi menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang berujung pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, penerimaan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengalihan Hak Milik Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan daerah akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah (Ariasih, 2013).

Berdasarkan konten isu diatas bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat berdampak terhadap diantaranya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Sumber Daya Alam. Penelitian ini berfokus pada variable Sumber daya alam, Jumlah tenaga kerja dan Jumlah Penduduk. Berdasarkan hasil penelitian Ariyani, (2016) terdapat pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah.

Beberapa hasil penelitian yang telah mengkaji topik tentang Kemandirian Keuangan Daerah yang berfokus pada judul pengaruh pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah menghasilkan beberapa temuan yang berbeda. Di antarnya penelitian yang dilakukan oleh Taryoko, (2016) menjelaskan bahwa ada pengaruh sumber daya alam dan jumlah penduduk

terhadap kemandirian keuangan daerah tetapi jumlah tenaga kerjanya tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian Putri (2017) Menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. namun hasil ini berbeda dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Ariasih (2013) menjelaskan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara jumlah penduduk dengan kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dalam penelitian Anwar (2019) sumber daya alam tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan peneliti yaitu "Bagaimana Pengaruh Sumber Daya Alam, Jumlah Tenaga Kerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar balakang di atas, maka rumusan masalah penilitian ini yaitu sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana pengaruh sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah?

1.2.2 Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap kemandirian keuangan daerah?

1.2.3 Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk menguji pengaruh sumber daya alam terhadap kemandirian keuangan daerah.

1.3.2 Untuk menguji pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap kemandirian keuangan daerah.

1.3.3 Untuk menguji pengaruh jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang sejauh mana pengaruh sumber daya alam, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan informasi berupa bukti empiris tentang pengaruh sumber daya alam, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kota Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Sumber Daya Alam

Setiap daerah memerlukan potensi sumber daya alam dalam pembangunan dan pengembangan inrastruktur suatu daerah untuk mensejahtrerahkan masyarakat dan untuk kemajuan suatu daerah.

1. Pengertian Sumber Daya Alam

   Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tidak hanya komponen biologis seperti hewan, tumbuhan dan mikroorganisme, tetapi juga komponen non-biologis seperti minyak, gas alam, berbagai jenis logam, air dan tanah. (Maddinsyah & Syakhrial, 2018)

   Sumber daya alam mengacu pada hal-hal bermanfaat yang ada di alam dan memiliki nilai dalam kondisi yang kita temukan sumber daya alam. Jika sesuatu yang ditemukan tidak jelas dan oleh karena itu tidak berharga, atau sesuatu yang bermanfaat tidak dapat digunakan dalam jumlah besar dibandingkan dengan permintaan, maka SDA dapat dianggap tidak bernilai. (Bastian., 2012).

2. Peranan Sumber Daya Alam

   Peranan relatif sumber daya alam dalam perkembangan ekonomi cenderung untuk turun bila perokonomian itu semakin berkembang. Dengan naiknya pendapatan, maka hasrat berkonsumsi marjinal pada sumber-

sumber alam nampak berkurang. Lagi pula in put alat-alat produksi per satuan output untuk sumber-sumber alam akan menurun atau setidak-tidaknya tetap. Turunnya perananya penting dari sumber-sumber alam terutama berhubungan dengan "*income elasticity of demand*" yang relatif rendah terhadap hasil-hasil pertanian. Demikian juga perubahan dalam fungsi produksi yang disebabkan oleh kemajuan teknik bibit yang baik, penggunaan pupuk dan juga adanya pengelolaan tanah yang lebih efisien (Djula, 2013).

2.1.2 Jumlah Tenaga Kerja

Suatu organisas memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan suatu kegiatan pembangunan dan pengembangan untuk mancapai dan mewujudkan tujuan tertentu suatu organisasi

1. Pengertian Sumber Daya Manusia atau Tenaga Kerja

   Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dan merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketika tenaga kerja berpartisipasi dalam proses produksi, pekerja menerima pendapatan sebagai pembayaran atas pekerjaan yang mereka selesaikan, yaitu upah. (Taryoko, 2016)

   Menurut Werther dan Davis (1996) dalam Soerrisno (2016: 4), sumber daya manusia adalah "karyawan yang siap, mampu dan siaga untuk mencapai tujuan organisasi". Seperti disebutkan di atas, aspek utama dari sumber daya adalah kontribusinya bagi organisasi.

   Smith (1729-1790) dalam Idris (2016:2) merupakan pokok ilmu ekonomi disebut aliran klasik. Adam Smith percaya bahwa manusia adalah

faktor utama produksi yang menentukan kemakmuran suatu negara. Hipotesis Adam Smith didasarkan pada pandangan bahwa jika tidak ada sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam (tanah) dengan baik sehingga bermanfaat bagi kehidupan, maka sumber daya alam (tanah) menjadi tidak berarti. Smith menekankan bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah syarat yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi.

2. Peran dan Fungsi Sumber Daya Manusia dalam Ekonomi.

Sumber daya manusia yang tergolong sebagai tenaga kerja (Man Power) adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *Labour Force* terdiri dari golongan yang bekerja, golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Idris (2016:9)

Ketiga golongan dalam angkatan kerja sewaktu- waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu,kelompok ini sering juga dinamakan sebagai potensial *Labour Force*. Efisiensi kerja seseorang juga dipengaruhi oleh motivasi setiap orang, tingkat pendidikan dan pelatihan yang diterima, dan kemampuan manajemen. Orang yang telah mengenyam

pendidikan dan pelatihan yang lebih tinggi pada dasarnya memiliki efisiensi kerja yang lebih tinggi.Idris (2016:9)

2.1.3 Jumlah penduduk

Penduduk yang berkedudukan atau tinggal disuatu daerah tertentu dengan tujuan untuk kesejahterakan mereka.

1. Pengertian Penduduk

   Penduduk adalah penyedia tenaga kerja dalam proses pembangunan ekonomi. Perubahan variabel demografi (kesuburan, kematian, migrasi) akan mempengaruhi perubahan jumlah, kualitas dan distribusi tenaga kerja. Pada tahap selanjutnya, perubahan kuantitas, kualitas dan distribusi tenaga kerja akan mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa analisis ekonomi tenaga kerja pada dasarnya adalah bagian dari ekonomi kependudukan. Junaidi dan Hardiani (2009:8)

   Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Para ahli ekonomi klasik yang di pelopori Adam smith bahkan menganggap bahwa jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyakpula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah,maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yangsemakin bertambah. (Asmuruf, 2015)

   Ilmu demografi adalah alat yang menggunakan data dan statistik kependudukan, serta penghitungan matematis dan statistik data

kependudukan, untuk mempelajari perubahan kependudukan, terutama perubahan kuantitas, persebaran, dan komposisi / struktur. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan komponen utama pertumbuhan penduduk (yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi), yang pada gilirannya menyebabkan perubahan ukuran, struktur, dan distribusi populasi. Marhaeni (2017:7).

2. Ruang Lingkup Ilmu Kependudukan

Menurut Kementerian Keuangan (2015) Ilmu kependudukan memiliki dua ruang lingkup, yaitu:

a. Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang biasanya tinggal di suatu tempat atau berkeluarga selama 6 bulan atau lebih, atau yang sudah 6 bulan tidak tinggal tetapi berniat untuk hidup.

b. Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang senantiasa berinteraksi menurut adat istiadat tertentu dan terikat oleh identitas.

3. Komposisi Penduduk

Komposisi Penduduk menurut Kementerian Keuangan (2015), yaitu:

a. Biologi: umur, jenis kelamin

b. Sosial: pendidikan, status

c. Ekonomi: jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, tingkat pendapatan

d. Geografi: tempat tinggal

e. Budaya: agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. (Marhaeni,2017)

2.1.4 Kemandirian Keuangan Daerah

Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Republik Indonesia (PSAP). Laporan Tahun 2005 No. 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan laporan terstruktur tentang status keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang status keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan entitas pelapor.Informasi ini sangat berguna bagi pengguna untuk membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya. (Taryoko,2016)

1. Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran pemerintah daerah dalam hal ketergantungan daerah terhadap sumber dana pemerintah pusat dan propinsi. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah dan propinsi semakin rendah. (Suci & Asmara, 2014)

Kemandirian keuangan / keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan, pembangunan, dan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat ditentukan dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran dan pemungutan pajak daerah yang merupakan komponen utama PAD. (Pratiwi, 2016)

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggung jawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Sedangkan, menurut Mahardika & Artini (2012) Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target perencanaan terhadap realisasinya.

Ciri utama yang menunjukkan bahwa daerah otonom memiliki kemampuan otonom terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya daerah otonom harus mempunyai kekuasaan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup untuk menghimpun dana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah yang memiliki pendapatan mandiri besar akan memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan daerah yang mengandalkan pendanaan pemerintah pusat. Sebab, seiring upaya sendiri mendapatkan dana lebih, pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam pengelolaan keuangan. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber danah eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Swandewi, 2014).

Menurut Halim (2008) dalam Darwis (2015), pengukuran rasio kemandirian.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

2. Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Dalam pelaksanan desentralisasi sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan suatu daerah menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan suatu daerah dalam menggunakan PAD tersebut sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah tersebut. PAD merupakan sumber pendapatan asli daerah yang diperoleh dan dimanfaatkan berdasarkan potensi daerah. Tujuan PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan kinerja desentralisasi daerah. (Suci & Asmara, 2014)

Sumber-sumber PAD terdiri dari . (Suci & Asmara, 2014):

1) Pajak daerah merupakan pembayaran wajib oleh orang atau badan kepada daerah tanpa kompensasi langsung, dan digunakan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pajak termasuk pajak provinsi, kabupaten dan kota. (Suci & Asmara, 2014)
2) Restribusi Daerah yang merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib restribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah, dalam hal ini terdapat imbalan langsung yang dapat dinikmati pembayar restribusi. Berbeda dengan

pajak daerah yang bersifat tertutup, dalam restribusi ini, pemerintah daerah diberi peluang untuk menambah jenisnya namun harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. (Suci & Asmara, 2014)

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk Menyediakan dana untuk kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk mengurangi kesenjangan keuangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mempersempit kesenjangan fiskal. Dana perimbangan bisa menggantikan PAD. Pendapatan dana perimbangan bergantung pada pendapatan PAD daerah. Jika bagi hasil dan PAD daerah rendah, pendapatan dana perimbangan biasanya akan meningkat. Pendapatan dari dana perimbangan bisa menurun, biasanya di daerah-daerah di mana PAD dan kapasitas fiskalnya meningkat secara signifikan. (Suci & Asmara, 2014):

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemandirian keuangan daerah yang dilakukan oleh beberapa peneliti-peneliti terdahulu dengan waktu dan daerah yang berbeda, antara lain:

Tabel 2.1Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama, judul, Tahun	Variabel	Metode	Hasil
1	Taryoko, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah di Desa Istimewa Yogyakarta periode 2006-2013, 2016.	Sumber daya alam, jumlah tenaga kerja, jumlah penduduk, kemandirian keuangan daerah	Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisis 4 variabel bebas berupa data panel yang diperoleh dari cross-section5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakaerta dengan time seriesselama 8 tahun. Alat analisis yang digunakan berupa regresi data panel dengan fixed effect model.	Jumlah penduduk dan sumber daya alam berpengaruh postif terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah
2	Jolianis, Pengaruh sumber daya alam dan sumber daya manusia terhadap penerimaan daerah, 2014	Sumber daya alam, sumber daya manusia	Penelitian kuantitatif yang bersifat kausif dan teknik analisis yang digunakan analisis linear berganda	Sumber daya alam perpengaruh terhadap penerimaan daerah, sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerimaan daerah
3	Ariasih, Utama dan Wirathi, Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah	Jumlah penduduk, kemandirian keuangan daerah	Penelitian ini mengunakan teknik analisis jalur dengan penerapan model regresi Linear	Jumlah penduduk berpengaruh tidak langsung terhadap kemandirian keuangan

	Provinsi Bali Tahun 1991-2010", 2013.			daerah
4	Putri, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2015, 2017.	Sumber daya alam, jumlah tenaga kerja dan kemandirian fiskal daerah	Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menganalisis tiga variabel bebas berupa data panel yang diperoleh dari cross-section 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan time series selama 4 tahun. Alat analisis yang digunakan berupa regresi data panel dengan fixed effect model.	Sumber daya alam dan jumlah tenaga kerja berpengaruh dan signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah
5	Anwar, Determinasi Tingkat Kemandirian Keungan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2017,2019.	Sumber daya alam, jumlah penduduk dan kemandirian keuangan daerah	penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dengan sampel yang berjumlah 304 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data panel dengan pendekatan terpilih yaitu fixed effect model.	Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan sumber daya alam tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah

6	Septian, Pengaruh Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2012, 2016.	Jumlah penduduk, kemandirian keuangan daerah	Metode pemilihan sampel adalah metode purposive sampling. Kemudian menggunakan metode analisis jalur untuk melakukan perhitungan regresi pada metode regresi berganda (ordinary least squares = OLS) dari model persamaan melalui program versi 19 SPSS untuk menganalisis data.	Jumlah penduduk memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah
7	Pratiwi, Pengaruh Penduduk dan PDRB Per Kapita terhadap Kemandirian Keuangan Melalui PKB dan BBNKB, 2016.	Jumlah penduduk, kemandirian keuangan daerah	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan data yang bersifat sekunder	Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah
8	Asmuruf, Pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di Kota Sorong, 2015.	Jumlah penduduk	Metode analisisnya menggunakan metode Analisis regresi berganda	Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah

2.3 Kerangka Konseptual

Peneliti menggunakan variable Sumber Daya Alam (X1), Jumlah Tenaga Kerja (X2), Jumlah Penduduk (X3) dan Kemandirian Keuangan Daerah (Y). Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

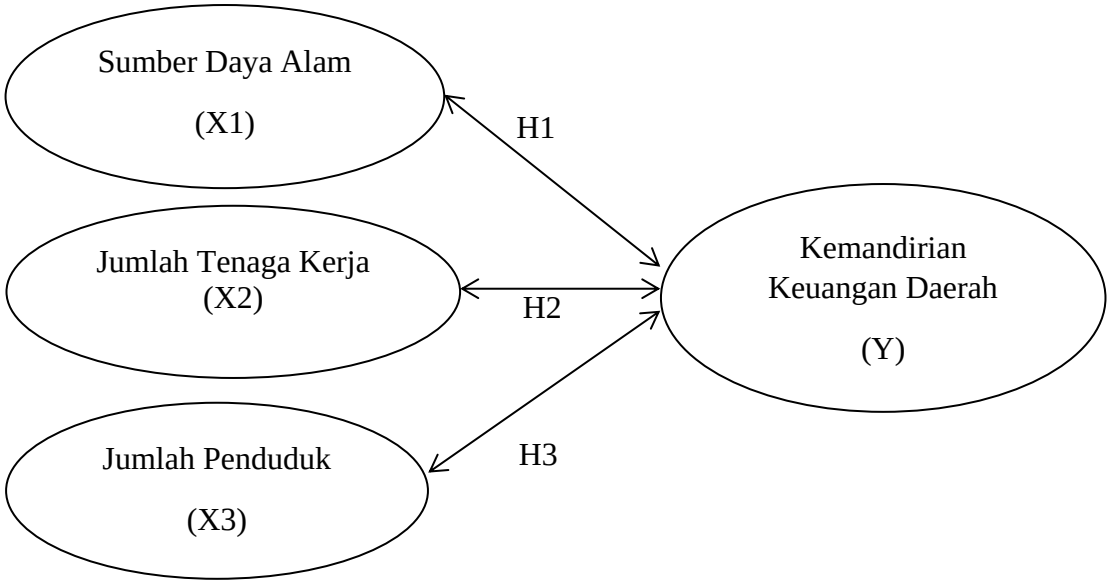

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dan juga beberapa penelitian terdahulu yang sejalan mengunakan variabel independen dan variabel dependen yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian Taryoko (2016) bahwa sumber daya alam dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daearah dan penelitian Putri (2017) bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah. maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: diduga bahwa Sumber Daya Alam berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

H2: diduga bahwa Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

H3: diduga bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis metode pada penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan model regresi. Peneliti menggunakan model regresi karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 3 variabel independen yaitu Sumber daya alam, Jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap variable dependen yaitu Kamandirian Keuangan Daerah. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil dan menarik suatu keputusan didalam memecahkan suatu masalah.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen seperti artikel, laporan keuangan, buku dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data penelitian ini diperoleh melalui laporan keuangan dan data data terdahulu pada laporan yang dibutuhkan. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan mendownload laporan yang ada di website BPS Kota Palopo mengenai data Sumber Daya Alam, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk, dan data mengenai Laporan Realisasi Anggaran.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.

Teknik yang digunakan adalah dokumentasi karena data informasi yang dibutuhkan diperoleh dengan mendownload data dari website Badan Pusat Statistik Kota Palopo seperti:

1. Data Sumber Daya Alam, yaitu Jumlah Produksi Perikanan (ton) di Kota Palopo dari tahun 2010- 2019. Pengambilan jumlah produksi perikanan karena perikananlah yang memberikan jumlah produksi yang besar.
2. Data Jumlah Tenaga Kerja (jiwa) di Kota Palopo dari tahun 2010- 2019.
3. Data Jumlah Penduduk (jiwa) di Kota Palopo dari tahun 2010- 2019.
4. Data Pendapatan Asli Daerah (Rp) dan Dana Perimbangan (Rp) di Kota Palopo dari tahun 2010- 2019.

Selain dari, Badan Pusat Statistik peneliti juga melakukan studi kepustakaa dari buku-buku dan jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3.4 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan mengenai analisis Pengaruh Sumber Daya Alam, Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, ada tiga variable independen dan satu variabel dependen dalam penelitian ini. Definisi operasional untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

3.4.1 Variabel dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel independen atau variabel bebas Sugiyono (2010:4). Variabel dependen dari penelitian ini adalah kemandirian

Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi pada Kota Palopo. Kota Palopo dikatakan Mandiri apabila mampu membiaya segala kegiatan pemerintah dan mengembangkan derahnya untuk keberlanjutan Kota Palopo.

Menurut Halim (2008) dalam Darwis (2015), pengukuran rasio kemandirian.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

3.4.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2010:4) variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat atau variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Sumber Daya Alam

   Sumber daya alam merupakan salah satu potensi terpenting bagi suatu daerah karena sumber daya alam yang dikelola dapat memberikan dampak yang banyak untuk keberlanjutan suatu daerah. Sumber daya alam juga dimanfaat kan untuk pembangunan dan pengembangan daerah pada Kota Palopo.

2. Jumlah Tenaga Kerja

   Tenaga kerja adalah orang-orang yang berkontribusi dan bekerja dalam suatu organisasi untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan suatu organisasi untuk kesejahteraan organisasi, masyarakat dan juga daerah di Kota Palopo.

3. Jumlah Penduduk

   Penduduk merupakan orang yang bertempat tinggal dan bertercatat sebagai warga daerah di Kota Palopo.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah agar dapat dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, outokorelasi, tidak mengandung heteroskedastisitas (Suliyanto,2011). Uji asumsi klasik meliputi:

a. Normalitas

   Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (*bell-shaped* curve) yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Uji normalitas disini tidak dilakukan per variabel tetapi hanya terhadap nilai residual terstandarisasinya Suliyanto (2011:69).

b. Multikolinieritas

   Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam modal regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara

variabel bebas atau tidak maka regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolinier Suliyanto (2011:81). Multikolinieritas akan membuat variabel-variabel independen tidak sama dengan nol. Mendeteksi adanya multikolinieritas dapat digunakan nilai tolerance dan varian inflation factor (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai tolerance lebih dari sama dengan 0,10 dan nilai VIF kurang dari sama dengan 10 maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut terdapat multikolinieritas.

c. Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang menurut waktu (*time-series*) atau ruang (*cross section*) Suliyanto, (2011:126). Uji ini digunakan untuk menghindari adanya autokorelasi pada suatu penelitian.

d. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut homoskedastisitas. Yang diharapkan pada model regresi adalah yang homoskedastisitas Suliyanto, (2011 :95).

3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua. Sugiyono (2017:275).

Pada Penelitian ini Penulis menggunakan analisis regresi linier berganda karena dalam penelitian ini memiliki variabel bebas lebih dari satu. Regresi linier berganda merupakan sebuah regresi yang mana jumlah variabel bebas yang digunakan untuk memprediksikan variabel tergantung dipengaruhi dua atau lebih variabel bebas. Suliyanto, (2011:53). Sehingga persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kemandirian Keuangan Daerah

α : Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi

x_1 : Sumber Daya Alam

x_2 : Jumlah Tenaga Kerja

x_3 : Jumlah Penduduk

e : Eror

a. Menghitung koefisien determinasi (R^2)

Rumus untuk menghitung r2 sebagai berikut:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(Y - \hat{Y})^2}{\sum(Y - \bar{Y})^2}$$

Keterangan:

R2 = Koefisien determinasi

$\sum(Y - \hat{Y})^2$ = Kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y prediksi

$\sum(Y - \bar{Y})^2$ = Kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y rata-rata.

b. Menghitung nilai t_{hitung}

Nilai t_{hitung} digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial (per variabel) terhadap variabel tergantungnya. Apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel tergantungnya atau tidak. Untuk menghitung besarnya nilai t_{hitung} digunakan formula sebagai berikut:

$$t_i = \frac{bj}{Sbj}$$

Keterangan:

t = Niali t_{hitung}

bj = Koefisien regresiP

Sbj = Kesalahan baku koefisien regresi

c. Menghitung nilai F_{hitung}

Nilai F_{hitung} digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel tergantungnya, maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau *fit*. Sebaliknya, jika tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kriteria tidak cocok atau *no fit.* Suliyanto (2011:55). Untuk menghitung nilai F digunakan formula sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/(k-1)}{1 - R^2/(n-k)}$$

Keterangan:

F = Nilai F_{hitung}

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variable

n = Jumlah pengamatan (ukuran sampel).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian Penelitian

4.1.1 Deskripsi Statistik

Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	36.97856	61.34360	162.7305	15.70000
Median	21. 86950	61.97550	160.8190	14.50000
Maximum	112. 2209	67.27800	180.6780	26.00000
Minimum	4.824000	55.23900	147.6770	9.000000
Std. Dev.	39. 94913	4.260489	11.62684	6.111010
Skewness	1.288425	0.030143	0.213044	0.612653
Kurtosis	2.961265	1.661813	1.696912	2.055885
Observations	10	10	10	10

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan tabel 4.1 juga dapat dilihat mean dari setiap nilai dari masing-masing variabel. Selain itu juga dapat dilihat standar deviasi nilai dari data masing-masing variabel. Beberapa penjelasan mengenai hasil perhitungan statistik diuraikan sebagai berikut.

a. Kemandirian Keuangan Daerah (Y)

Dari hasil pengujian statistik deskriptif, variabel kemandirian keuangan daerah sepanjang tahun 2010-2019. Dimana rata-rata kemandirian keuangan daerah pada tahun yang diamati adalah 36.97856. Dimana standar deviasi adalah 39.94917,. Dengan nilai minimum 4.824000 dan maksimumn 112.2209.

b. Sumber Daya Alam (X1)

Variabel sumber daya alam sepanjang tahun 2010-2019, dimana Inflasi memiliki rata-rata 61.34360 dengan nilai minimum 55.23900 dan nilai maksimum 67.27800 sedangkan standar deviasinya 4.260489.

c. Jumlah Tenaga Kerja (X2)

Dari hasil uji statistik deskriptif, variabel jumlah tenaga kerja sepanjang tahun 2010-2019, dapat disimpulkan bahwa rata-rata jumlah tenaga kerja adalah 162.7305 dengan standar deviasi sebesar 11.62684. Dengan nilai minimum 147.6770 dan maksimum sebesar 180.6780.

d. Jumlah Penduduk (X3)

Variabel jumlah pemduduk sepanjang tahun 2010-2019, dimana nilai tukar memiliki rata-rata 15.70000 dengan nilai minimum 9.000000 dan nilai maksimum 26.00000 sedangkan standar deviasinya 6.111010.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda, maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedasitas.

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independent, variabel dependent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan Uji Jarque-Bera. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel

dependen dan independen dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2006). Uji normalitas yang dilakukan dalam pengujian menggunakan aplikasi Eviews 7.

Residual dikatakan memiliki distribusi normal apabila nilai signifikan dari *Jarque Bera* diatas 5% dan tidak terdistribusi secara normal jika signifikan nilai *Jarque-Bera* dibawah 5%.

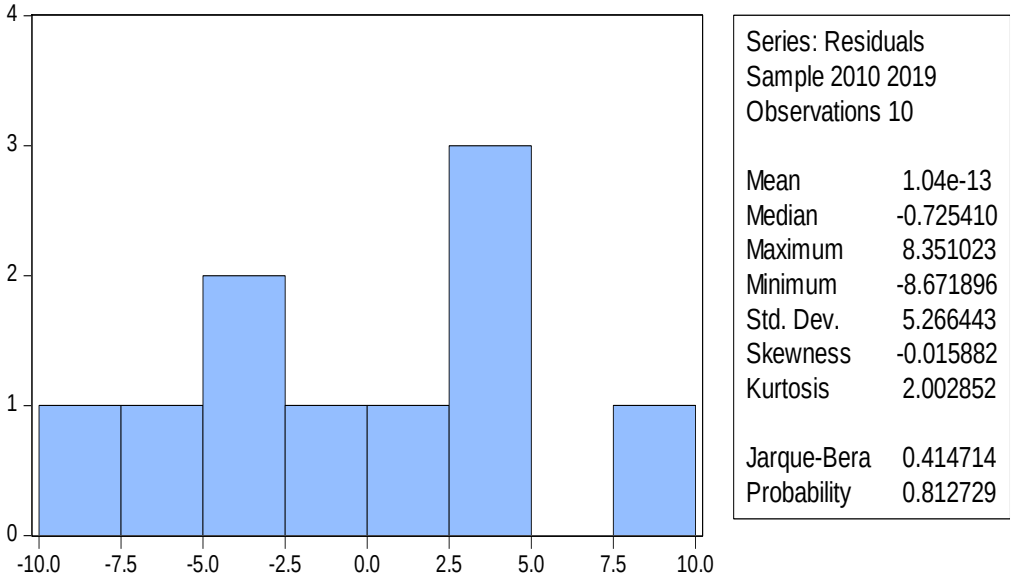

Gambar 4.1 Uji Normalitas

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai Jarque Bera sebesar 0.414714 > 0,05. Maka dari hasil pengujian persamaan regresi di atas dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari persamaan regresi di atas terdistribusi normal karena nilai Jarque-Bera berada di atas 5% atau 0,05.

b) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen terdapat korelasi atau hubungan dengan variabel independen lainnya atau dengan kata lain satu atau lebih variabel independen merupakan satu fungsi linear dari variabel independen lainnya. Salah satu cara untuk

menganalisis ada atau tidaknya pengaruh multikolinearitas dalam penelitian ini dengan melihat nilai *Correlation Matrix* menggunakan program *software eviews 7***.** Suatu data dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas jika nilai *correlation* antar variabel independen lebih kecil dari 0,8 (*correlation <0,8)* Dari data yang diolah dengan menggunakan program *Eviews 7*, didapatkan hasil uji multikolinearitas seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.399616	0.464554
X2	0.399616	1.000000	0.969898
X3	0.464554	0.569898	1.000000

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan hasil *output* tabel terlihat bahwa tidak terdapat masalah multikoleniaritas antara variabel independen karena nilai setiap variabel lebih kecil dari 0,8 *(correlation <0,8).*

c) Uji Heteroskedasitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang mengalami homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji *white.* Pengujian ini dilakukan

dengan bantuan program *Eviews 7* yang akan memperoleh nilai probabilitas Obs*R-square yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi (alpha). Jika nilai probabilitas signifikansinya di atas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya di bawah 0,05 maka dapat dikatakan telah terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 4.3 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	84.36014	38.77864	2.175428	0.0725
X1	-0.377255	0.194441	-1.940199	**0.1004**
X2	-0.417919	0.259105	-1.612934	**0.1579**
X3	0.707890	0.510308	1.387182	**0.2147**

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan hasil pengujian Eviews diperoleh nilai Probabilty lebih besar dibandingkan dengan dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam persamaan yang diuji dalam penelitian ini.

d) Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test), yaitu untuk menguji apakah terjadi korelasi serial atau tidak dengan menghitung nilai *d* statistik. Salah satu pengujian yang digunakan untuk

mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan memakai uji statistik DW test.

Berikut ini adalah hasil Uji Autokorelasi dengan uji statistik Durbin Watson :

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi

R-squared	0.982621	Mean dependent var	36.97856
Adjusted R-squared	0.973932	S.D. dependent var	39.94917
S.E. of regression	6.450049	Akaike info criterion	6.855227
Sum squared resid	249.6188	Schwarz criterion	6.976261
Log likelihood	-30.27613	Hannan-Quinn criter.	6.722453
F-statistic	113.0829	**Durbin-Watson stat**	**2.373383**
Prob(F-statistic)	0.000011		

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson 2.373383 (berada di sekitar 0,3760 sampai 2,4137), maka dapat dikatakan bahwa model regresi terbebas dari asumsi klasik autokorelasi.

4.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian regresi secara parsial (uji t) bertujuan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dengan membandingkan nilai probabilitas (*p-value*) dari masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05. Jika *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	**t-Statistic**	**Prob.**
C	233.4432	116.9638	1.995859	0.0930
X1	1.779022	0.586473	3.033427	0.0230
X2	-2.942694	0.781509	-3.765400	0.0093
X3	11.03630	1.539187	7.170212	0.0004

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2020

Hasil pengujian antara variable independen terhadap variable dependen secara individu (parsial) yang dilakukan dengan uji t adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel 4.5 variabel Sumber Daya Alam (X1) mempunyai nilai t-hitung 3.033427 > t tabel 1.943 dengan tingkat signifikansi sebesar **0.0230 < 0,05** . Hal ini berarti H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Sumber Daya Alam (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y), karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Sumber Daya Alam (X1) lebih kecil dari 0,05.
2. Hipotesis kedua dapat dilihat pada, Jumlah Tenaga Kerja (X2) mempunyai nilai t-hitung -3.765400 < t tabel 1.943 dengan tingkat signifikansi sebesar **0.0093 < 0,05**. Hal ini berarti H_2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Jumlah Tenaga Kerja (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y), karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Jumlah Tenaga Kerja (X2) lebih kecil dari 0,05.

3. Hipotesis ketiga dapat dilihat pada tabel 4.5, variabel Jumlah Penduduk (X3) mempunyai nilai t-hitung 7.170212 > t tabel 1.943 dengan tingkat signifikansi sebesar **0.0004 < 0,05**. Hal ini berarti H_3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Jumlah Penduduk (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y), karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Jumlah Penduduk (X3) lebih kecil dari 0,05.

b. Uji F Hitung

Uji ini dilakukankan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel tergantungnya. Jika variabel sumber daya alam, jumlah tenaga kerja, jumlah penduduk memiliki pengaruh secara simultan terhadap kemandirian keuangan daearah, f hitung dapat dilihat pada kolom *F-statistic*, yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Pengujian F Hitung

R-squared	0.982621	Mean dependent var	36.97856
Adjusted R-squared	0.973932	S.D. dependent var	39.94917
S.E. of regression	6.450049	Akaike info criterion	6.855227
Sum squared resid	249.6188	Schwa rz criterion	6.976261
Log likelihood	-30.27613	Hannan-Quinn criter.	6.722453
F-statistic	**113.0829**	Durbin-Watson stat	2.373383
Prob(F-statistic)	**0.000011**		

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2020

Hasil dari pengujian dari yang diperlihatkan kolom *F-statistic*, nilai F sebesar 113.0829 > f tabel 4.76 dan tingkat signifikan sebesar 0.000011 < 0,05.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya alam, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen, yaitu Sumber daya alam, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom *adjusted R square*, yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.982621	Mean dependent var	36.97856
Adjusted R-squared	**0.973932**	S.D. dependent var	39.94917
S.E. of regression	6.450049	Akaike info criterion	6.855227
Sum squared resid	249.6188	Schwa rz criterion	6.976261
Log likelihood	-30.27613	Hannan-Quinn criter.	6.722453
F-statistic	113.0829	Durbin-Watson stat	2.373383
Prob(F-statistic)	0.000011		

Sumber: Data Sekunder yang diolah 2020

Koefisien *adjusted R square* adalah sebesar 0.973 atau 97,3% Maka disimpulkan bahwa kontribusi pengaruh variabel Sumber Daya Alam (X1), Jumlah Tenaga Kerja (X2), Jumlah Penduduk (X3) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y) adalah sebesar 97,3%. Sedangkan sisanya 2,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.2 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non departemen yang melapor langsung kepada Presiden. BPS dulunya Badan Pusat Statistik, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus Penduduk dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai alternatif dari kedua undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 16 tentang Statistik tahun 1997 diundangkan. Berdasarkan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan selanjutnya, Badan Pusat Statistik resmi berganti nama menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi ini merupakan muatan baru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, antara lain: (1) Jenis data statistik berdasarkan tujuan penggunaan antara lain data statistik dasar yang dikelola sepenuhnya oleh BPS, data statistik departemen yang dilakukan sendiri oleh instansi pemerintah atau bersama dengan BPS, dan data statistik khusus. Data statistik. Diselenggarakan secara mandiri atau bersama-sama dengan BPS oleh lembaga, organisasi, perseorangan dan / atau unsur masyarakat lainnya. (2) Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS dipublikasikan secara berkala dan transparan dalam "Berita Resmi Statistik" (BRS) sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan / atau memperoleh data yang diperlukan, (3) Sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien , (4) Forum Asosiasi Statistik dibentuk untuk memenuhi harapan masyarakat statistik, dan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, BPS harus berperan sebagai berikut: (1) Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data

tersebut diperoleh dari sensus atau survei yang dilakukan secara terpisah, dan juga dapat diperoleh dari departemen atau instansi pemerintah lainnya sebagai data penolong; (2) Membantu kegiatan statistik departemen, instansi pemerintah atau instansi lain untuk membentuk sistem statistik nasional (3) Mengembangkan dan mempromosikan teknik dan metode statistik standar, serta memberikan layanan di bidang pendidikan dan pelatihan statistik; (4) Menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga internasional dan negara lain untuk mendorong perkembangan statistik di Indonesia.

Visi Pusat Statistik Palopo adalah menjadi pelopor dalam menyediakan statistik yang dapat diandalkan untuk semua. Mewujudkan misi Badan Pusat Statistik Palopo yaitu (1) Memperkuat landasan ketatanegaraan dan bisnis lembaga statistik untuk pengumpulan statistik yang efektif dan efisien; (2) Menciptakan kapasitas yang kompeten dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi terkini untuk memajukan statistik di Indonesia Dan ahli statistik professional, (3) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran dan kode etik statistik di setiap pengumpulan statistik, (4) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik semua pihak, (5) Memperkuat koordinasi kegiatan statistik, Integrasi dan sinkronisasi diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. (BPS, Palopo)

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Sumber Daya Alam terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tidak hanya mencakup komponen biologis seperti hewan, tumbuhan dan mikroorganisme, tetapi juga komponen non-biologis seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air dan tanah. (Maddinsyah & Syakhrial, 2018) Dari hasil uji t menggunakan Eviews 7, dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan tabel 4.11, variabel sumber daya alam mempunyai nilai signifikasi sebesar 0,230 < 0,05. hal ini membuktikan bahwa H1 diterima, yang berarti variabel sumber daya alam berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Maka bertambah besarnya tingkat pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Taryoko tahun 2016 menyatakan bahwa sumber daya alam berpengaruh positif singnifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, pemanfaatan/pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal oleh pemerintah daerah memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang diterima dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan (Taryoko, 2016). Sedangkan berbeda dengan penelitian (Anwar, 2019) menyatakan sumber daya alam tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.3.2 Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Tenaga kerja adalah orang-orang yang berkontribusi dan bekerja dalam suatu organisasi untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan suatu organisasi untuk kesejahteraan organisasi, masyarakat dan juga daerah. Sumber daya manusia yang tergolong sebagai tenaga kerja (Man Power) adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *Labour Force* terdiri dari golongan yang bekerja, golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan.

Dari hasil analisis yang dilakukan menggunakan Eviews 7, dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan tabel 4.11, variabel jumlah tenaga kerja mempunyai tingkat signifikansi 0,009> 0,05. hal ini membuktikan bahwa H_2, yang berarti variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, maka akan semakin dibutuhkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Jumlah penduduk mempengaruhi kemandirian finansial pemerintah daerah. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula persyaratan bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik (Taryoko, 2016). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, (Putri, 2017) menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, Sedangkan dengan (Taryoko, 2016)

menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Waluyo (2012), mengatakan bahwa semakin banyak penduduk akan membuat bertambahnya jumlah konsumsi penduduk, maka jumlah penerimaan dari retribusi dan pajak pun akan bertambah, secara otomatis pendapatan asli daerah akan ikut bertambah. Peningkatan PAD ini kemudian akan digunakan untuk membiayai kegiatan dan penyelenggaraan pemerintah di suatu kabupaten/kota, artinya daerah tersebut bisa secara mandiri dalam penyelengaraan pemerintahannya, selain itu pembangunan daerah bisa tercapai secara maksimal (Pratiwi.2016). Dari hasil analisis yang dilakukan menggunakan Eviews 7, dilihat hasil mengujian hipotesis ketiga variabel jumlah penduduk mempunyai tingkat signifikansi 0,004 < 0,05. Hal ini berarti H_3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Maka semakin tinggi jumlah peenduduk maka akan semakin bertambah pula jumlah konsumsi sehimgga dapat berdampak terhadap meningkatnya pendapatan asli daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Taryoko, 2016) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Peningkatan Jumlah Penduduk akan meningkatkan daya beli masyarakat di daerah. Peningkatan daya beli masyarakat ini tentu akan menjadikan tambahan pendapatan bagi daerah, sehingga kemandirian keuangan daerah meningkat. Selain itu, jumlah pendudukyang menempati suatu daerah juga akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jumlah Penduduk

yang semakin besar, maka akan menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik (Taryoko,2016).

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan mengenai penagaruh sumber daya alam, jumlah tenaga kerja dan jumlah penduduk terhadap kemandirian keuangtan daerah pada Kota Palopo tahun 2010-2019 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel sumber daya alam memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kota Palopo, sehingga hipotesis 1 diterima.
2. Variabel jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kota Palopo, sehingga hipotesis 2 diterima.
3. Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kota Palopo, sehingga hipotesis 3 diterima.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan rekomendasi beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus bisa memperhatikan dan berupaya lebih meningkatkan kemandirian keuangan daerah khususnya dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yaitu sumber daya alam, jumlah tenaga kerja, dan nilai jumlah penduduk agar lebih meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah.
2. Penelitian ini selanjutnya disarankan menambahkan variabel independen dari penelitian ini dengan variabel lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi

tingkat kemandirian keuangan daerah seperti pertumbuhan pajak daerah, retribusi daerah dan variabel lainnya dimana fluktuasi dari variabel tersebut dapat berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

ANWAR, D. K. Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur 2010-2017.

Ariasih, P. (2013). Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB per Kapita terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.

Arikunto, S. (2000). Manajemen Penelitian edisi baru. *Jakarta: Rieneka Cipta. Bandung: Alfabeta. hlm, 306*.

Ariyani, T. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Kemandirian Keuangan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara (Master's thesis).

Asmuruf, M. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *EFISIENSI*, *15*(5).

Bastian, A. (2012). Balanced Scorecard Sebagai Indikator Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, *1*(2), 51-56.

Darmanto, Habib Candra. 2012. Pengaruh Population, Employment, Size dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.

Darwis, E. T. R. (2015). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, *3*(1).

Djula, B. (2013). Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi. *dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negri Gorontalo*.

Ghazali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Universitas Diponegoro: Semarang.

Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Idris, H. A. (2016). Pengantar ekonomi sumber daya manusia. Deepublish.

Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jakarta (ID): RI*.

Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Junaidi, J., & Hardiani, H. (2009). Dasar--Dasar Teori Ekonomi Kependudukan.

Keuangan, Kementerian. (2015). Kajian Kependudukan. *Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Anggaran, Jakarta*.

Leigh, N. G., & Blakely, E. J. (2016). *Planning local economic development: Theory and practice*. SAGE publications.

Maddinsyah, A., Kustini, E., & Syakhrial, S. (2018). Penyuluhan Manajemen Pemanfaatan Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Kampung Ciboleger Lebak-Banten. *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana*, *1*(1), 71-80.

Mahardika, I. G. N. S., & Artini, L. G. S. (2012). Analisis Kemandrian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Manajemen*, *3*(3).

Marhaeni, A. A. I. N. (2017) Buku Pengantar Kependudukan Jilid 1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Nasional, B. P. P., & NASIONAL, B. P. P. (2004). Visi Dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005–2025. *Retrieved Maret*, *23*, 2017.

No, J. G. P., & Barat, P. S. (2014). Pengaruh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia terhadap Penerimaan Daerah. *Journal of Economic and Economic Education Vol*, *3*(1), 42-52.

Palopo, B. P. S. K. (2020). Kota Palopo Dalam Angka. *BPS Kota Palopo, Sulawesi Selatan*

PRATIWI, S. O. (2016). *PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN PDRB PER KAPITA TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH MELALUI PENERIMAAN PKB DAN BBNKB DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2014* (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).

PUTRI, D. N. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2015* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ANDALAS).

Ramadhani, F. R. (2016). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah di Kota Tarakan Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *14*(1), 85-98.

Rinaldi, U. (2013). Kemandirian keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah

Ronald, A., & Sarmiyatiningsih, D. (2010). Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi

Daerah di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, *1*(1), 31-42.

Septian, V. (2016). *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2012* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Maranatha).

Soetrisno, E., & Si, M. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana.

Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, *3*(1), 8-22.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D.

Suliyanto, D. (2011). Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS. *Penerbit Andi: Yogyakarta*.

Swandewi, A. A. I. A. (2014). Pengaruh dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah terhadap keserasian anggaran dan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *J Ekon Bis*, *3*(7), 356-376.

Taryoko (2016) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2013 Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2016

https://palopopos.fajar.co.id/2019/01/24/tingkatkan-kontribusi-sektor-perikanan-dan-kelautan/

https://palopokota.bps.go.id/menu/1/informasi-umum.html#masterMenuTab2